



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
  - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB V PENUTUP

**Pasal 3**

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 4**

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 51 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2026





# RENJA

Dinas Sosial dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Batam  
Tahun 2026





# RENJA

Dinas Sosial dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Batam  
Tahun 2026

PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS SOSIAL  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
JALAN RAJA HAJI NO. 9 SEKUPANG BATAM TELEPON (0778) 321370

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyeksikan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, September 2025

Plt Kepala Dinas Sosial dan  
Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam



Drs. Heriman HK

Pembina Utama Muda IV C

NIP. 19670908 198711 1 001

## **Daftar Tabel**

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR TABEL.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR .....	III
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1    Pengertian Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.2    Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	2
1.2    LANDASAN HUKUM.....	4
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.3.1    Maksud .....	7
1.3.2    Tujuan .....	7
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II	
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM .....	9
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN .....	54
3.1.    TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	54
3.2.    TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2026 .....	54
3.3.    PROGRAM DAN KEGIATAN .....	56
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .....	70
BAB V	
PENUTUP .....	81
5.1.    CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA .....	81
5.2.    KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN .....	81
5.3.    RENCANA TINDAK LANJUT .....	82

### **Daftar Tabel**

Tabel 2.1	10
Tabel 2. 2	19
Tabel 2. 3	20
Tabel 2. 4	24
Tabel 2. 5	42
Tabel 3. 1	56
Tabel 3. 2	58
Tabel 4. 1	71

### **Daftar Gambar**

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
Gambar 1. 2 Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3
Gambar 3. 1 Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025	54
Gambar 3. 2 Visi dan Misi Wali Kota Batam	55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

##### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan akhir yang disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah dan dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan

sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

### 1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

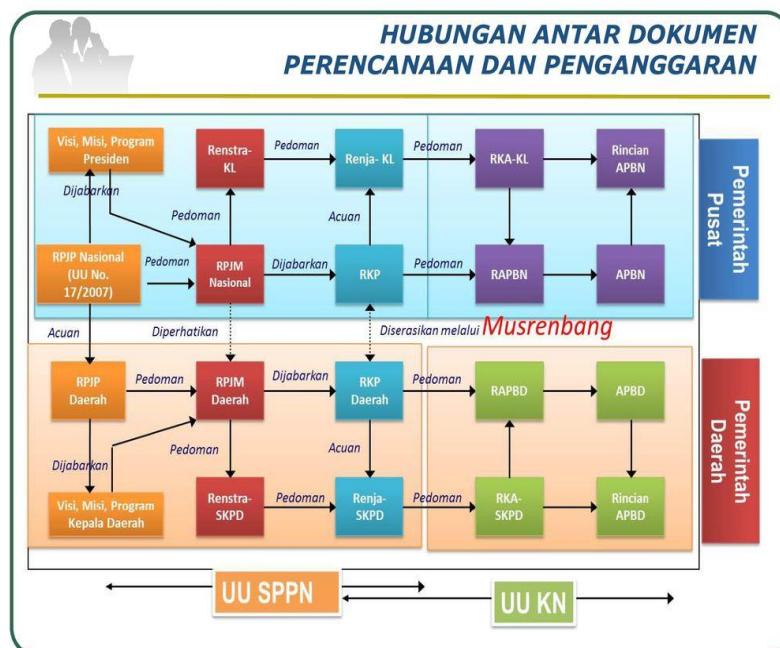
- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan **rancangan akhir**; dan
- f. penetapan.



**Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

### **1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (termasuk kementerian/lembaga=KL) maupun pemerintah daerah (termasuk satuan kerja perangkat daerah = SKPD). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka pendek. Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



**Gambar 1. 2 Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  13. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
  15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
  16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
  17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
  18. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2023 Tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026.
  19. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026
2. sebagai pedoman monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan
3. sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tema, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2024
- 3.3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.4. Program dan Kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENCANA KERJA TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA**  
**BATAM**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2024 DAN CAPAIAN  
RENSTRA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA BATAM**

Jumlah pagu anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.43.215.795.726,00 dengan realisasi belanja sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp.41.873.823.093,00 atau sebesar 96,89%.

Dalam penganggaran tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 8 Program dan 13 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 dan Capaian Rencana dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM S/D DESEMBER 2024**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Tabel : T.C - 29

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %

1.06.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %
1.06.02	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	100 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	100 %			

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 %	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 %
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	79.01 %	79.01 %	79.01 %	79.01 %	100 %	79.01 %	79.01 %	100 %
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %

1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	89.66 %	89.66 %	89.66 %	89.66 %	100 %	89.66 %	89.66 %	100 %
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara	89.66 Persen	89.66 Persen	89.66 Persen	89.66 Persen	100 %	89.66 Persen	89.66 Persen	100 %
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %	100 %	93.75 %	93.75 %	100 %

2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	100 %	12 Kelurahan	12 Kelurahan	100 %
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %	98.44 %	98.44 %	100 %	98.44 %	98.44 %	100 %

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %
2.13.05.2.01										

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	686 Lembaga	686 Lembaga	686 Lembaga	686 Lembaga	100 %	686 Lembaga	686 Lembaga	100 %
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 dan capaian Renstra, program dan kegiatan yang disajikan per Desember 2024, yang disajikan semuanya mencapai 100%. Hal ini mengingat beberapa pekerjaan dapat dianggarkan sesuai target yang sudah ditetapkan.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang disajikan pada Tabel 2.2, sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2024**

Tabel T.C-30

NO	INDIKATOR	SPM/SNI	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	SPM	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	94%	96%	96%	95%	94%	96%	96%	
2	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	SPM	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	89%	90%	90%	90%	89%	90%	90%	
3	Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik			56%	94%	100%	75%	56%	94%	94%	
4	Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif			94%	99%	100%	98%	94%	99%	99%	

**Tabel 2. 3**  
**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA**  
**BATAM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	94%	94%	100%
2	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	89%	89%	100%
3	Meningkatnya kelurahan dengan administrasi pemerintahan yang baik	Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik	56%	56%	100%
4	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif	94%	94%	100%

Berdasarkan tabel II.3 terkait pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang merupakan menjadi Indikator Kinerja Utama yang disajikan tidak semuanya mencapai 100%. Hal ini mengingat beberapa pekerjaan tidak dapat dianggarkan sesuai target yang sudah ditetapkan, sebagaimana dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* hal ini di ukur dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah  $\times 100\%$
2. Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Terhadap (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) PPKS* hal ini di ukur dari Jumlah hasil pada program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial (190) / jumlah program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial (2)  $\times 100\%$
3. Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya Perlindungan dan jaminan Sosial Masyarakat* hal ini diukur dengan Jumlah

- hasil pada Program Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana (179) / jumlah Program Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana (2) x 100%
4. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasi pemerintahan yang baik hal ini diukur dengan Jumlah kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik sebanyak (48) / jumlah kelurahan yang ada sebanyak (64) x 100%
  5. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif diukur dengan Jumlah kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif (675) / Jumlah Kelembagaan masyarakat yang ada (681) x 100%

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompotensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah PSKS dan pekerja-pekerja sosial. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.

2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki, Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pencapaian target 100% diperlukan dana yang tidak sedikit. dana yang bersumber dari dana APBD Kota Batam maupun Provinsi Kepuluan Riau, APBN masih terbatas untuk melakukan Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial secara menyeluruh.
3. Kesulitan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas sangat tinggi seperti Tuna Sosial sehingga data selalu berubah. Disisi lain partisipasi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan juga masih kurang dalam Pembangunan Bidang Sosial.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan baik SDM, Organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinsospm Kota Batam dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos kerja yang baik, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota batam diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan Bidang Sosial nasional secara umum dan Kesejahteraan masyarakat Kota Batam khususnya.

Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pencapaian fungsi tersebut diatas sehingga menjadi isu strategis antara lain karena :

- a. Masih terbatasnya dan minimnya sumber daya manusia Sosial yang bersifat pegawai tetap yang ada saat ini terutama yang berlatar belakang Pekerja Sosial;
- b. Masih kurang optimalnya pemberian pelayanan secara prima karena pemahaman dan rasa pengabdian yang kurang;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Sosial yang sesuai tuntutan teknologi terkini;
- d. Belum tercapaianya standar pelayanan sesuai yang telah ditetapkan;
- e. Kurangnya kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional

Prosedur;

- f. Belum memadai system manajemen dan pengendalian mutu;
- g. Masih terbatasnya sarana prasarana fisik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Belum memadainya pengelolaan asset
- i. Belum efektifnya system pelayanan penunjang;
- j. Belum terpenuhinya SDM yang berkualitas;

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD**

Review terhadap rencana kerja RKPD disajikan pada Tabel II.4 berikut ini :

**Tabel 2. 4**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

NO	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	12,144,130,626	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	14,501,571,376	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	124,570,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	91,797,500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	124,570,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	91,629,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 Dokumen	83,800	

		SKPD				SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	83,800
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>100 Persen</b>	<b>10,417,534,226</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>100 Persen</b>	<b>12,923,886,192</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	10,331,994,226	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	12,796,546,192
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Kegiatan	85,540,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Kegiatan	127,340,000

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	<b>100 Persen</b>	<b>397,673,200</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	<b>100 Persen</b>	<b>409,208,500</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	25,394,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	25,394,400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	168,852,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	180,387,300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	30,528,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	30,528,800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Kali	172,898,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Kali	172,898,000

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	<b>100 Persen</b>	<b>132,433,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	<b>100 Persen</b>	<b>260,780,184</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	43,647,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	68,725,384	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	88,786,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	192,054,800	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	<b>100 Persen</b>	<b>339,990,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	<b>100 Persen</b>	<b>335,190,000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	339,990,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	335,190,000	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	<b>100 Persen</b>	<b>731,930,200</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	<b>100 Persen</b>	<b>480,709,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	41,080,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	41,080,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	297,090,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	257,619,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	161,260,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	182,010,000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kota Batam</b>	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan	<b>100 %</b>	<b>1,749,350,610</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kota Batam</b>	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan	<b>100 %</b>	<b>1,073,731,000</b>	

		sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial				sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial			
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif	<b>100 Persen</b>	<b>1,749,350,610</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif	<b>100 Persen</b>	<b>1,073,731,000</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				536,666,869	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	887,797,000

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi dalam Penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	1,040,869,651	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi dalam Penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	100,794,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluhan Sosial, Penyuluhan Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	114 Orang	171,814,090	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluhan Sosial, Penyuluhan Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	114 Orang	85,140,000

3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Batam	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	<b>100 Persen</b>	<b>1,768,307,080</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Batam	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	<b>100 Persen</b>	<b>1,664,330,774</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direabilitasi	<b>100 Persen</b>	<b>1,768,307,080</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direabilitasi	<b>100 Persen</b>	<b>1,664,330,774</b>

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	235,428,600	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	136,062,100	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	24,691,000	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	128,510,000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150,190,000	

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	358,249,480	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	352,406,430	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	704,266,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	692,914,944	
Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0		Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	13,159,200	

	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	74,867,000	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	72,375,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	266,986,000	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	222,532,100	
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kota Batam	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial	<b>79.01 %</b>	<b>10,240,954,090</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kota Batam	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial	<b>79.01 %</b>	<b>16,268,621,300</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi	<b>100 Persen</b>	<b>10,240,954,090</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi	<b>100 Persen</b>	<b>16,268,621,300</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	60108 Orang	1,106,236,090	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	977,749,700

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9,134,718,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3620 Orang	15,290,871,600	
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kota Batam	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Tanggap Darurat Bencana	<b>100 Persen</b>	<b>516,324,020</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kota Batam	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Tanggap Darurat Bencana	<b>100 %</b>	<b>500,029,800</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	<b>100 Persen</b>	<b>516,324,020</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	<b>100 Persen</b>	<b>500,029,800</b>

	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	516,324,020	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500,029,800	
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kota Batam	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	<b>100 Persen</b>	<b>347,795,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kota Batam	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	<b>100 Persen</b>	<b>235,649,000</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		Persentase pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan	<b>100 Persen</b>	<b>347,795,000</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		Persentase pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan	<b>100 Persen</b>	<b>235,649,000</b>	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	45 Makam	239,795,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	45 Makam	160,979,800	

	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	108,000,000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	74,669,200	
7	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Kota Batam	<b>Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>	<b>100 Persen</b>	<b>234,191,600</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Kota Batam	<b>Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>	<b>100 Persen</b>	<b>234,180,700</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		Persentase kelurahan yang tertib administrasi	<b>100 Persen</b>	<b>234,191,600</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		Persentase kelurahan yang tertib administrasi	<b>100 Persen</b>	<b>234,180,700</b>	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	234,191,600	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	234,180,700	
8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Kota Batam	<b>Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif</b>	<b>100 Persen</b>	<b>21,826,930,500</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Kota Batam	<b>Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif</b>	<b>98.44 %</b>	<b>23,522,574,250</b>	

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif lembaganya	<b>100 Persen</b>	<b>21,826,930,500</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Percentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif lembaganya	<b>100 Persen</b>	<b>23,522,574,250</b>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	21,052,653,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	22,077,486,150

	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	300,416,500	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	298,339,000		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Laporan	473,861,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Laporan	450,303,100		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	-	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	696,446,000		
9	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100%	316,000,500	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100%	293,968,127	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	<b>316,000,500</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	<b>293,968,127</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35,350,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35,225,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	55,770,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	33,880,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	224,880,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	224,863,127	

10	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Batam	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	100 %	<b>1,055,058,000</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Batam	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	100 %	<b>1,023,300,100</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direhabilitasi	100 %	<b>1,055,058,000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direhabilitasi	100 %	<b>1,023,300,100</b>
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	1,055,058,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	1,023,300,100
<b>JUMLAH</b>					<b>50,199,042,026</b>	<b>JUMLAH</b>				
59,317,956,427										

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Rencana Program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan hampir 80% berhubungan dengan kepentingan masyarakat, usulan dari masyarakat yang ditampung dalam kegiatan berasal dari musyawarah pembangunan daerah dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.5, yaitu :

**Tabel 2. 5**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	CATATAN PENTING
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>100 Persen</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Kegiatan	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	<b>100 Persen</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Jenis	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Kali	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	<b>100 Persen</b>	
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	<b>100 Persen</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Percentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	<b>100 Persen</b>	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kota Batam</b>	Percentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	<b>100 %</b>	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		Percentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif	<b>100 Persen</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi dalam Penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluhan Sosial, Penyuluhan Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	114 Orang	
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Kota Batam</b>	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	<b>100 Persen</b>	

<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direabilitasi	<b>100 Persen</b>	
Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	
Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	
Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	
Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	
Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	
Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kota Batam	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial	<b>100 %</b>	

<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi	<b>100 Persen</b>	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3620 Orang	
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Kota Batam</b>	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Tanggap Darurat Bencana	<b>100 %</b>	
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	<b>100 Persen</b>	
Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Kota Batam</b>	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	<b>100 Persen</b>	

<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		Percentase pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan	<b>100 Persen</b>	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	45 Makam	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Kota Batam	<b>Percentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>	<b>100 Persen</b>	
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		Percentase kelurahan yang tertib administrasi	<b>100 Persen</b>	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	
<b>PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Kota Batam	<b>Percentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	

<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Percentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif lembaganya	<b>100 Persen</b>	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Laporan	

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	<b>100%</b>	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	<b>100%</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	

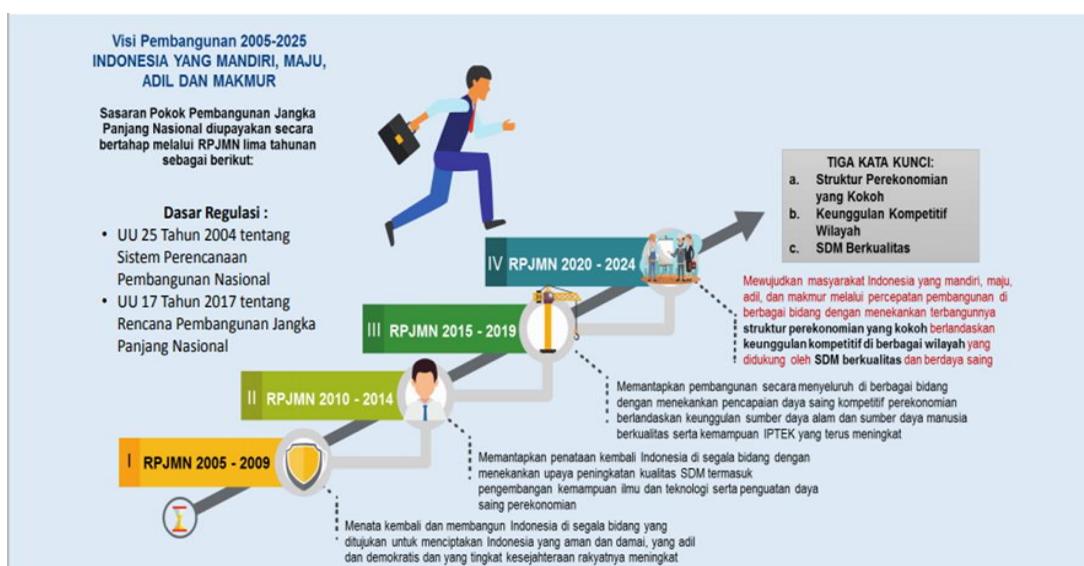
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Batam	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	<b>100 %</b>	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direhabilitasi	<b>100 %</b>	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang ke- lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong



**Gambar 3. 1 Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025**

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2026**

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2025 - 2029 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:



**Gambar 3. 2 Visi dan Misi Wali Kota Batam**

misi ke 3 (tiga) yaitu “Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhhlak mulia.”

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Tahun 2025-2029 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

**Tabel 3. 1**

**TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TA 2026**

NO	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PD	TARGET 2026
1	Meningkatkan pelayanan sosial terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase penurunan PPKS	1.35%
2	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	96%
3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	90%
4	Meningkatkan pemberdayaan/kapasitas kelembagaan masyarakat dalam berpartisipasi di pembangunan	Persentase kelurahan aktif dan baik	100%
5	Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasи pemerintahan yang baik	Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik	100%
6	Meningkatnya kelembagaan Kemasyarakatan yang aktif	Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif	100%

**3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 - 2029. Perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat disusun sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga) Kota Batam tahun 2025 - 2029 direncanakan

berjumlah 8 (Delapan) program Perangkat Daerah, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 35 (Tiga puluh Lima) Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>58.000.688.200,73</b>			<b>56.089.545.809,00</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>34.243.933.250,73</b>			<b>30.411.747.699,00</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>34.243.933.250,73</b>			<b>30.411.747.699,00</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>14.501.571.376,73</b>		-	<b>14.627.651.592,00</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja Perangkat Daerah	100 %	91.797.500,00		-	197.110.800,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	91.629.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		197.110.800,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	83.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	83.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>12.923.886.192,00</b>		-	<b>12.923.886.192,00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	12.796.546.192,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.796.546.192,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	127.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		127.340.000,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur</b>	<b>100 %</b>	<b>409.208.500,00</b>		-	<b>437.616.080,00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.394.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		27.976.080,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	180.387.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		185.737.200,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.528.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		33.715.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	172.898.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		190.187.800,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>260.780.184,73</b>		-	<b>145.676.300,00</b>
	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	68.725.384,73	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		48.011.700,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	192.054.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		97.664.600,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>335.190.000,00</b>		-	<b>373.989.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	335.190.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		373.989.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>480.709.000,00</b>		-	<b>549.373.220,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		45.188.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	257.619.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		326.799.220,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	182.010.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		177.386.000,00
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>1.073.731.000,00</b>		-	<b>1.897.452.326,00</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>1.073.731.000,00</b>		-	<b>1.897.452.326,00</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							

		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	887.797.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.144.956.615,00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	100.794.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		188.995.499,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	114 Orang	85.140.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		563.500.212,00
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Percentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.</b>	<b>100 %</b>	<b>1.664.330.774,00</b>		<b>-</b>	<b>1.671.063.360,00</b>

	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Percentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direabilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>1.664.330.774,00</b>		<b>-</b>	<b>1.671.063.360,00</b>
<b>Penyediaan Permakanan</b>							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	136.062.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		258.971.460,00
<b>Penyediaan Sandang</b>							
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	24.691.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		60.000.000,00
<b>Penyediaan Alat Bantu</b>							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150.190.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		141.361.000,00
<b>Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</b>							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	352.406.430,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		394.074.428,00
<b>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan</b>							

	Masyarakat						
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	692.914.944,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		774.692.600,00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	13.159.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		60.000.000,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	72.375.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		82.353.700,00
	Pemberian Layanan Rujukan						
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	222.532.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		293.684.600,00
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Percentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>16.268.621.300,00</b>		-	<b>11.265.049.499,00</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi</b>	<b>100 %</b>	<b>16.268.621.300,00</b>		-	<b>11.265.049.499,00</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						

	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	977.749.700,00	-		1.216.859.699,00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3620 Orang	15.290.871.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10.048.189.800,00
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>500.029.800,00</b>	-	<b>567.956.422,00</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>500.029.800,00</b>	-	<b>567.956.422,00</b>
Penyediaan Makanan						
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500.029.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		567.956.422,00
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>235.649.000,00</b>	-	<b>382.574.500,00</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100 %</b>	<b>235.649.000,00</b>	-	<b>382.574.500,00</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					

	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	45 Makam	160.979.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		263.774.500,00
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	74.669.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		118.800.000,00
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		<b>23.756.754.950,00</b>			<b>24.517.234.310,00</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		<b>23.756.754.950,00</b>			<b>24.517.234.310,00</b>
7	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>	<b>100 %</b>	<b>234.180.700,00</b>	-	<b>257.610.760,00</b>
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase kelurahan yang tertib administrasi</b>	<b>100 %</b>	<b>234.180.700,00</b>	-	<b>257.610.760,00</b>
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	234.180.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		257.610.760,00
8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>23.522.574.250,00</b>	-	<b>24.259.623.550,00</b>

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif lembaganya	100 %	23.522.574.250,00	-	24.259.623.550,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	22.077.486.150,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		23.157.918.300,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	298.339.000,00	-		330.458.150,00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	450.303.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		521.247.100,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					

	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	696.446.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		250.000.000,00	
	UPTD P2PMKS NILAM SURI			1.317.268.227,00			1.160.563.800,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.317.268.227,00			1.160.563.800,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1.317.268.227,00			1.160.563.800,00
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	293.968.127,00	-	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	293.968.127,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.225.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	33.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	224.863.127,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00
10	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.</b>	<b>100 %</b>	<b>1.023.300.100,00</b>		-	<b>1.160.563.800,00</b>
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direhabilitasi	100 %	1.023.300.100,00		-	1.160.563.800,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	1.023.300.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.160.563.800,00
	<b>J U M L A H</b>				<b>59.317.956.427,73</b>		<b>56.089.545.809,00</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut :

**Tabel 4. 1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

KODE	URUSAN/BID.URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				59.317.956.427		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.561.201.477		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	14.501.571.376	APBD	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja Perangkat Daerah		2 Dokumen	91.797.500		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	91.629.900		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		1 Dokumen	83.800		

		SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	83.800		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		<b>100 Persen</b>	<b>12.923.886.192</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	12.796.546.192		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Kegiatan	127.340.000		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur		<b>100 Persen</b>	<b>409.208.500</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Jenis	25.394.400		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Jenis	180.387.300		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Jenis	30.528.800		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Kali	172.898.000		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		<b>100 Persen</b>	<b>260.780.184</b>		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	68.725.384		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	192.054.800		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		<b>100 Persen</b>	<b>335.190.000</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	335.190.000		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Percentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		<b>100 Persen</b>	<b>480.709.000</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	41.080.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	257.619.000		

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	182.010.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-		
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Percentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>1.073.731.000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Percentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif		<b>100 Persen</b>	<b>1.073.731.000</b>		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Lembaga	887.797.000		
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi dalam Penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota		14 Orang	100.794.000		

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluhan Sosial, Penyuluhan Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya		114 Orang	85.140.000		
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Percentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Kota Batam	<b>100 Persen</b>	<b>1.664.330.774</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Percentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direabilitasi		<b>100 Persen</b>	<b>1.664.330.774</b>		
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Orang	136.062.100		
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Orang	24.691.000		

	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orang	150.190.000		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		70 Orang	352.406.430		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		450 Orang	692.914.944		
	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Orang	13.159.200		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	72.375.000		
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	222.532.100		
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Percentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial	<b>Kota Batam</b>	<b>79.01 %</b>	<b>16.268.621.300</b>	<b>APBD</b>	

	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Percentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi		<b>100 Persen</b>	<b>16.268.621.300</b>		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		31320 Orang	977.749.700		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		3620 Orang	15.290.871.600		
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Percentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Tanggap Darurat Bencana	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>500.029.800</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Percentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		<b>100 Persen</b>	<b>500.029.800</b>		
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		500 Orang	500.029.800		
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Percentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	<b>Kota Batam</b>	<b>100 Persen</b>	<b>235.649.000</b>	<b>APBD</b>	

	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Percentase pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan		<b>100 Persen</b>	<b>235.649.000</b>		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		45 Makam	160.979.800		
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		12 Laporan	74.669.200		
7	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Percentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100 Persen</b>	<b>234.180.700</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Percentase kelurahan yang tertib administrasi		<b>100 Persen</b>	<b>234.180.700</b>		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		3 Dokumen	234.180.700		
8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Percentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>98.44 %</b>	<b>23.522.574.250</b>	<b>APBD</b>	
7	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Percentase Lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif lembaganya		<b>100 Persen</b>	<b>23.522.574.250</b>		

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		711 Lembaga	22.077.486.150		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3 Laporan	298.339.000		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		12 Laporan	450.303.100		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		3 Dokumen	696.446.000		
9	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	<b>293.968.127</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100%	<b>293.968.127</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak		1 Unit	35.225.000		

	Lapangan	dan Perizinannya					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	33.880.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	224.863.127		
10	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Percentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Kota Batam	<b>100 %</b>	<b>1.023.300.100</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Percentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direhabilitasi		<b>100 %</b>	<b>1.023.300.100</b>		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		500 Orang	1.023.300.100		
				Total	<b>59.317.956.427</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA**

Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Batam. Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026 ini sudah mengacu pada RPJMD dan Renstra periode Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan Dokumen Anggaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangan pelaksanaannya program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

#### **5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2021-2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah -kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya RPJMD, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota Batam, RKPD Kota Batam dan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
2. Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun bersumber dari APBD

### **5.3. RENCANA TINDAK LANJUT**

Program dan kegiatan pada Renja 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring.
4. Dalam menjamin konsistensi sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam secara berjenjang, bertanggungjawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja 2026.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD